

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aminah, Siti, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2015.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cetakan Kedua.
- Astawa, I Gde Pantja, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung : P.T Alumni, 2013.
- Bactiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Budiman, Hendra, *Pilkada Langsung daan Demokrasi Palsu*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Hamdan, Iwan K , *Berhala Pilkada*, Banten: CIRED, 2008.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ishom, Muhammad, *Legal Drafting*, Malang: Setara Press, 2017.

- Kaloh, J., *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cetakan Kedua.
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mappiase, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, Cetakan Kedua.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cetakan Keempat.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Purnama Media, 2015.
- M, Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muttaqin, Entol Zaenal, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, Serang: LP2M, 2014.
- Nadiroh, *Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Keluarga, 2008.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Ridho, Zainor, *Pengantar Ilmu Politik*, Serang, LP2M UIN SMH Banten, 2015.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, *Politik Huukum konstitusi dan mahkamah konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Cetakan Keempat.
- Syafe'i, Inu Kencana, *Proses Legislatif*, Bandung: Rafika Aditama, 2014, cetakan Kedua.
- Syafe'i, Zakaria, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyash*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi (Suatu Stadi Tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2006.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thaib, Dahlan, dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Tutik, Titik Triwulan , *Konstruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ubaedillah, A., dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, hak asaasi manusia, dan masyarakat madani*, Jakarta: Kencana, 2011, Edisi Ketiga.
- Zaman, Rambe Kamarul, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Jakarta: Mizan Publika, 2016.

Jurnal Dan Skripsi:

Ayuni, Qurrata, “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 1, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, Maret 2018.

Elmiyana, Skripsi Berjudul: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah, Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

Hendrawan, Indra, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK no. 97//PUU-XI//2013” *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 4 No. 1, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, April 2015.

Nazriyah, R., Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No 3, Universitas Muhammadiyah Gresik, September 2015.

Pramudya, Kelik, “Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Berkeadilan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4 No. 1, MT&P Law Firm, April 2015.

Samsul, Inosentius, “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?”, *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014.

Wicaksono, Dian Agung, “Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota di Indonesia” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4 No. 1, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, April 2015.

Widarto, Joko, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus di Anggap Benar”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, April 2016.

Zoelva, Hamdan, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 3, September 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Kamus Hukum:

Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Jala
Permata Aksara, 2010.